

**PERANAN DA'I SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

**NOVIANTO**  
02193005



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

## ABSTRAK

Novianto, Skripsi, Da'I dan Politik Studi : Peranan Da'I sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 92 Halaman, 25 buku, 2 artikel internet,

Sebagai pemuka agama penyeru nilai-nilai Islam (dakwah), fungsi seorang Da'i menjadi sangat penting di tengah masyarakat terlebih pada masyarakat Sumatera Barat yang mempunyai tradisi Islam yang kuat dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Da'i dalam politik praktis tidak hanya memunculkan pro dan kontra tentang Islam dan politik, namun juga menjadi pertanyaan tentang peranan Da'i ketika dalam politik praktis dalam hal ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Da'i yang mempunyai tugas utama sebagai penyeru nilai-nilai "suci" (berdakwah) terlibat dalam politik yang sebagian orang masih menganggap "kotor". Ketika seorang Da'i berada dalam lingkungan politik praktis sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang Da'i untuk tetap menjaga idealisme sebagai seorang penyeru nilai-nilai kebenaran dan pencegah dari kemungkaran (*amar makruf nahi mungkar*). Kuatnya tantangan yang dihadapi oleh seorang Da'i menjadi menarik untuk dilihat seperti apa peranan Da'i dalam politik praktis sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk triangulasi data teknik yang dilakukan adalah dengan saling mengkonfrontir data yang didapatkan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan unit analisis individu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketika seorang Da'i masuk kedalam politik praktis, tidak semua Da'i mampu memberikan keteladanan dan tidak semua Da'I bisa bertahan dengan idealismenya. Seorang Da'I sebaiknya memilih partai yang berideologi Islam, walaupun untuk konteks Sumatera Barat hal itu tidak terlalu berpengaruh.

Saran dari penelitian ini adalah Seorang Da'I jika ingin masuk kedalam politik praktis harus mempunyai idealisme yang kuat sehingga nilai-nilai islam yang layak nya diusung oleh seorang Da'I juga bisa dicontohkan dan diperjuangkan ketika menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Kata Kunci :Da'I, Peranan, Politik Praktis, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumatera Barat.**

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keterlibatan ulama atau Da'i dalam dunia politik hingga saat ini masih menjadi perdebatan, tidak hanya dikalangan masyarakat umum tapi juga dikalangan ulama itu sendiri. Perbedaan pendapat tentang Islam dan politik dimulai setelah runtuhnya khilafah Islamiyah. Seorang ulama Al-Azhar Ali Abrurraziq, dengan tulisan *Islam wa Ushulil Hukmi* (tahun 1925) yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak memiliki pemerintahan, negara. Islam adalah risalah rohani semata. Nabi Muhammad tidak bermaksud mendirikan negara dan ini tidak termasuk dalam ajaran yang dibawakan<sup>1</sup>.

Menurut Abdul Munir Mul Khan dalam bukunya yang berjudul *Perubahan Perilaku Politik Dan Polarisasi Umat Islam* mengatakan bahwa ulama menempati stratifikasi sosial paling atas dalam komunitas sosial umat, sehingga dengan posisinya tersebut seorang ulama mempunyai posisi lebih dan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dimata umat<sup>2</sup>. Dengan posisi tersebut seorang ulama mempunyai daya tarik tersendiri ketika berkecimpung dalam dunia politik.

Akibat fragmentasi kepentingan, gerakan sebagian Da'i yang sebelumnya kental dengan warna kulturalnya, kini terpolarisasi ke arah gerakan-gerakan struktural. Da'i yang dulu pergerakannya hanya dari mimbar ke mimbar menyebarkan dakwah, sekarang Da'i sudah mulai masuk bergerak kedalam

---

<sup>1</sup> <http://warkop.wordpress.com/2007/02/27/partai-politik-islam/> diakses 3 agustus 2007 jam 10.00 wib  
<sup>2</sup> Abdul Munir Mul Khan. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal.17.

struktur politik melalui keterlibatan langsung dalam politik praktis. Pergeseran posisi Da'i itu, antarlain dilatar belakangi oleh perubahan politik nasional. Reformasi 1998 yang menyebabkan derasnya arus demokratisasi disegala aspek kehidupan, membuat semua aktor pelaku dalam negara, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dituntut berperan aktif untuk menjaga keseimbangan. Da'i sebagai salah satu aktor civil society dalam negara Indonesia turut mengambil peran-peran strategis dalam struktural negara sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi layaknya warga negara yang lain<sup>3</sup>.

Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan partai politik sebenarnya merupakan bagian dari pembahasan agama (*din*) dan politik (*siyasah*). Pada saat awal kehadiran Islam masalah pertama yang di hadapai adalah politik, bagaimana rasulullah mengatur strategi untuk bisa menyebarkan Islam diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai ketika Islam itu mendapatkan kekuasaan dengan semakin bertambahnya jumlah pemeluk Islam Rasulullahpun mulai bedakwah secara terang-terangan. Namun Persoalan ini juga menjadi perdebatan panjang berbagai kalangan yang hingga kini belum menemukan titik temu dan jauh dari selesai.

Ada tiga aliran utama dalam wacana intelektual muslim dalam melihat Islam dan politik<sup>4</sup> yaitu :

Aliran *pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam artian Barat, yaitu hanya menyangkut hubungan manusia secara individu dengan tuhannya. Islam adalah suatu agama yang sempurna dan komprehensif yang

---

<sup>3</sup> Koirudin. *Politik Kiai ; Polemik keterlibatan kiai dalam politik praktis*. Averroes Press, 2005 Hal.88.  
<sup>4</sup> [http://www.acehinstitute.org/opini\\_rizwan\\_rekrutmen\\_politik.htm](http://www.acehinstitute.org/opini_rizwan_rekrutmen_politik.htm) diakses 3 Agustus 2007 jam 10.00

mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya aspek politik. Agama dan politik mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan satu samalain. Formalitas agama dalam negara harus dilaksanakan karena Islam mempunyai sistem pemerintahan terbaik yang pernah ada yang berakir pada masa Turki Usmani. Aliran ini akrab disebut aliran integral yaitu kelompok yang menyatukan antara Formalitas Islam dalam struktur politik. Tokoh-tokoh utama dalam aliran ini antarlain Syaikh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb (dengan Ikhwan al-Muslimun-nya), Syaikh Muhammad Rasyid Ridha (dengan Jami'ah Islamiyah-nya) dan Abdul A'la al-Maududi.

Islam merupakan sebuah agama yang di sampaikan oleh Muhammad SAW yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Sebagai pemimpin umat Nabi Muhammad adalah negarawan dan politisi ulung. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Nabi Muhammad bermain di semua lini kehidupan, baik sipil maupun militer. Ketika Nabi Muhammad menjadi panglima perang, cara berpikir yang digunakan adalah cara berpikir militer dan politik. Begitu pula dengan zaman sesudahnya sampai sekarang, ulama atau Da'i ada juga yang ikut berpolitik sesuai dengan masa dan tempatnya.

Islam sebagai agama merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi segenap aspek kehidupan. Menurut Imam Syafii Politik adalah bagian tidak terpisahkan dari syariah. Dalam Perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah, yang dimaksudkan sebagai instrumen dakwah adalah bagaimana politik yang dianut oleh sekelompok tertentu disandarkan kepada tujuan dakwah yang intinya adanya suatu usaha untuk merealisasikan nilai-nilai

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti menyadari bahwa keterbatasan sumber yang membahas peran Da'i dalam kancah politik praktis khususnya politik lokal (Sumatera Barat), sedikit banyaknya juga telah membatasi pengetahuan peneliti dalam menunjang penelitian ini, sehingga peneliti merasa penelitian ini masih sangat layak untuk dikembangkan dalam rangka menggali lebih dalam tentang keterlibatan Da'i dalam politik praktis. Hal ini tentunya tidak hanya dimaksudkan untuk memperkaya aspek teoritis tentang keterlibatan Da'i dalam politik tetapi jauh dari itu peneliti melihat bahwa yang lebih substansi dari itu adalah agar keterlibatan Da'i dalam kancah politik praktis tidak hanya sekedar "ikut-ikutan" yang pada akhirnya juga akan membawa citra buruk bagi Da'i itu sendiri sehingga dikhawatirkan semakin kuatnya arus yang menolak keberadaan Da'i dalam politik yang akan bermuara pada pemisahan agama dengan politik dan itu tentu saja akan merugikan umat Islam pada khususnya.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dimana keterlibatan Da'i yang berada di lembaga legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ternyata didalamnya terdapat tantangan-tantangan bagi Da'i dalam berdakwah dan tantangan seperti itu harus diperjuangkan oleh Da'i sebagai bagian dari dakwah yang merupakan aktivitas bagi seorang Da'i. Tantangan itu tidak hanya berada dari luar (anggota fraksi lain)

tetapi juga dari dalam fraksinya sendiri, apalagi kalau Da'i tersebut berada dalam fraksi yang ideologi Partai Politiknya bukan Islam.

Keberadaan Da'i dalam politik praktis akan sangat mendukung ketika Da'i tersebut berada dalam partai Islam karena nilai-nilai yang ada pada diri seorang Da'i akan berbanding lurus dengan tujuan partai tersebut dan sebaliknya ketika seorang Da'i berada dalam partai yang non Islam/l sedikit banyaknya akan berpengaruh pula terhadap nilai-nilai yang dianut oleh partai tersebut sehingga pada akhirnya akan menghambat tujuan dakwah Da'i tersebut. Walau demikian untuk konteks Sumatera Barat pengaruh Ideologi Partai Politik tidak terlalu mempengaruhi peranan Da'i dalam menjalankan perannya sebagai pendakwah, ini dikarenakan Mayoritas anggota DPRD Sumatera Barat beragama Islam dan didukung lagi dengan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai Islami seperti filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS, SBK).

Keberadaan Da'i dalam politik praktis sangat dibutuhkan dalam rangka memerankan aktivitas Da'i, hal ini dapat bermanfaat dalam menunjang terciptanya peraturan-peraturan yang Islami seperti terwujudnya perda Islami yang tentunya lebih dipahami oleh seorang Da'i dalam seluk beluknya.

Kelemahan-kelemahan seorang Da'i yang terungkap dalam penelitian ini harusnya menjadi catatan penting bagi seorang Da'i ketika memutuskan terlibat dalam politik praktis sehingga kedepannya seorang Da'i ketika masuk dalam politik praktis, tidak hanya sebagai pelengkap tetapi seorang Da'i harus menjadi penggerak dalam kelompoknya dan juga harus lebih vokal dibandingkan dengan anggota-anggota dewan yang lainnya, dengan itu masyarakat akan melihat

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :PT.Rineka Cipta, 2002.
- Faisal, Sanafiah. *Format-format penelitian sosial*. Jakarta.Rajawali Press.2001
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, PT Gramedia, 1997.
- Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Kosda Karya, 1997
- Agus, Bustanudin Prof. *Islam dan Pembangunan*. Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
- Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Meretas Jalan Kebangkita Islam : Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*. Solo : Era Intermedia, 2001.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. PT Syaamil Cipta Media
- Amin, Samsul Munir. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, Amzah Jakarta 2008.
- Basayev, Abu Syamil. *Urgensi Dakwah di Parlemen dan Pemerintahan*. Jakarta : Tazkia Production Pess, 2004.
- Ezzati A. *The Revolutionary Islam*, Terjemahan Agung Sulistiyadi, gerakan Islam : sebuah analisis, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1990.
- Ghazali, A Muchtar. *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*. Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Hafid,Wardah. *Islam dan Perubahan sosial politik di negara sedang berkembang*, PLP2M, Yogyakarta, 1985.
- Hassan, Sahar dkk. *Memilih Partai Islam*. Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.1998.
- Karim, M Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta :Tiara Wacana Yogya, 1999.